

Tuntaskan 178 Kasus Pemprov

PONTIANAK. Kebocoran Rp 156 miliar dan US \$ 11.709.282,89 anggaran Pemprov Kalbar Tahun 2010 berdasar audit BPK RI didesak untuk diselesaikan.

"Pemantauan BPK RI Perwakilan Kalbar atas penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Provinsi Kalbar perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," tegas Heri Gunawan, Staff Media dan Jaringan JARI Borneo Barat kepada Equator, Jumat (30/9).

Heri meminta BPK memastikan anggaran US \$ 11.709.282,89 yang berpotensi merugikan daerah. "Kepada aparat penegak hukum di Kalbar, hendaknya berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan ada unsur pidana dari 178 kasus temuan BPK itu," kata Heri.

Christianus Lumano, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar, kepada wartawan beberapa waktu lalu menjelaskan, khusus temuan sebesar US \$ 11.709.282,89 belum diketahui secara persis pos anggarannya.

"Kerugian daerah sebesar USD 11.709.282,89 itu berdasarkan temuan dari BPK. Saya tidak mengetahui persis anggaran tersebut," jelas dia.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah provinsi Kalbar diketahui per 31 Desember 2010 kerugian daerah yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 178 kasus. (jul)